

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara (Imansyah, 2012: 375), disamping pemilu yang juga menjadi pilar utama demokrasi, selain itu partai politik memiliki peranan yang sangat penting seperti dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik (Harjanto, 2011: 138). Partai politik dinilai menjadi satu-satunya lembaga penyalur para pemimpin-pemimpin bangsa dan juga pejabat-pejabat kenegaraan karena partai politik memiliki peran yang salah satunya adalah sebagai rekrutmen politik. Sebagai pengorganisasian warga negara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan bertujuan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan negara serta mengisi posisi-posisi politik di semua tingkatan, partai politik merupakan “tulang punggung” demokrasi. Partai politik menjadi penghubung antara politis dengan pemilik kekuasaan (rakyat) dan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan.

Partai politik atau organisasi lain dapat dikaderkan dengan menumbuhkan anggota inti yang berbakat, berdedikasi, dan berkomitmen yang mampu memajukan prinsip dan agenda partai dengan sukses. Kader, atau kelompok inti, sering kali terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen kuat yang telah dipilih dan dilatih untuk mencerminkan pandangan dan tujuan partai. Proses kaderisasi mencakup perekrutan dan pengajaran orang-orang yang memiliki filosofi partai, memberi mereka informasi dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk mempromosikan agenda partai secara efektif, dan menempatkan mereka pada posisi kepemimpinan dalam struktur partai (Ferdian et al, 2020).

Kaderisasi dan rekrutmen adalah dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan dari kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Menurut Tead (dalam Kartono, 1994: 51), kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi.

Mekanisme rekrutmen politik biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu secara terbuka dan tertutup, dengan demikian suatu partai politik bisa memilih dan mendapatkan kader yang mumpuni. Sementara itu, disebutkan juga bahwa partai politik di Indonesia bersifat nasional dan untuk itu syarat pendirian dan pengakuannya sebagai badan hukum menjadi sangat berat. Partai politik harus memiliki kepengurusan di semua provinsi, di sedikitnya 75% kab/kota di masing-masing provinsi, dan di sedikitnya separuh kecamatan di setiap kabupaten dan kota tersebut. Untuk meningkatkan kesetaraan gender, partai politik juga didorong untuk memiliki setidaknya 30% pengurus perempuan di tingkat pusat.

Keterwakilan, partisipasi, hingga aktivitas perempuan dalam politik praktis di Indonesia dan negara lain masih terhambat pertumbuhannya (Abdulkadir & Müller, 2020; Godjali & Mayrudin, 2020; Prager, 2020). Pentingnya eksistensi politik kaum

perempuan umumnya didasari oleh argumen bahwa untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kebijakan publik haruslah dimulai dengan kehadiran perempuan dalam jabatan politik. Hal tersebut juga diiringi dengan semakin meluasnya kesadaran mengenai pengarusutamaan gender. Di Indonesia sendiri kebijakan affirmative action 30% tertera pada UU No 2 Tahun 2008 dan peraturan lainnya. Kebijakan tersebut dibuat sebagai peluang, kesempatan, dan dorongan bagi para perempuan untuk menunjukkan eksistensinya dalam politik (Hurriyah, 2019, Panjaitan, 2014, Talaohu, 2021).

Kesadaran perempuan untuk ikut serta dalam politik praktis merupakan sebuah keharusan mengingat sebetulnya mereka punya peluang dan potensi yang bisa dimaksimalkan. Kebijakan kuota 30% tersebut memberikan sebuah ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam kontestasi politik yang akan berdampak pada peranan signifikan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang tidak bias gender (Fata, 2014). Alokasi kuota 30% juga dapat memberi dampak konkrit bila didukung oleh langkah strategis dari partai politik untuk mendorong dan merekrut kader perempuan potensial untuk kemudian berkiprah pada politik praktis (Heryati, 2005). Pada sisi inilah, partai politik memainkan peran kunci dalam mempromosikan kadernya, khususnya kader perempuan dalam proses politik (Hurriyah, 2019; Panjaitan, 2014; Wan Asrida, Wazni, 2016).

Dilansir dari laman detik.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan sebanyak 106 orang sebagai caleg DPRD terpilih periode 2024-2029 dan hanya 25 caleg perempuan yang berhasil lolos.

tabel 1. Perolehan Kursi Caleg Perempuan Terpilih pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024

Partai Politik	Total Caleg Terpilih Perempuan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4 orang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8 orang
Partai NasDem	1 orang
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2 orang
Partai Golongan Karya (Golkar)	2 orang
Partai Amanat Nasional (PAN)	3 orang
Partai Demokrat	2 orang
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3 orang

Sumber: DPRD DKI Jakarta. (data diolah oleh penulis)

Di DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara Berdasarkan data diatas hanya 8 dari 11 partai politik yang berhasil mengirimkan kader perempuannya untuk lolos legislatif dan 3 partai lainnya yaitu PKB, PPP, dan Perindo tidak berhasil lolos. Diantara 25 orang caleg perempuan tersebut, didapat ada 6 orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan *incumbent* atau orang yang pernah menjabat di pemerintahan. Dalam konteks ini jaringan keluarga dan hubungan personal seringkali menjadi faktor penentu dalam pencalonan dan pemilihan calon legislatif. Politik kekerabatan dapat memberikan keuntungan bagi kader perempuan yang memiliki relasi keluarga dengan tokoh politik, namun juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas representasi dan kompetensi kandidat.

Menurut data dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), sedikitnya 79 dari total 580 anggota DPR terpilih periode 2024–2029 terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik sebelumnya, seperti suami, istri, anak, atau saudara dari politisi atau penguasa daerah lainnya . Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hubungan kekerabatan memengaruhi keberhasilan kader perempuan dalam pemilihan legislatif.

yang memiliki dinamika politik yang kompleks, fenomena ini lebih menonjol. Kader perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik lokal atau nasional sering kali mendapatkan posisi strategis dalam pencalonan legislatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah keberhasilan mereka semata-mata didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas pribadi, ataukah lebih dipengaruhi oleh faktor kekerabatan? Meskipun terdapat kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari harapan. Pada Pemilu 2024, misalnya, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 21,90%, yang masih jauh dari target yang ditetapkan . Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan yang mencalonkan diri meningkat, faktor-faktor lain seperti hubungan kekerabatan tetap memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan mereka.

Berkembangnya politik kekerabatan khususnya di DKI Jakarta pada masa demokrasi elektoral saat ini sungguh merupakan suatu kecenderungan yang perlu diperlambat bahkan jika mungkin diakhiri. Hal ini tentu tidak lepas dari banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu, karena sulitnya kritik, pengawasan, maupun mekanisme *checks and balances* untuk dapat berjalan. Dengan bertumbuh nya politik kekerabatan, maka *playing field* juga akan semakin timpang karena politik kekerabatan sudah dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi tertentu akan lebih mungkin memenangkan kontestasi politik, dibandingkan calon lain yang sumber dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan.

Penguatan politik kekerabatan ini tampak sekali dalam pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif, banyak partai politik yang tidak mampu mengusung kader-kader potensial terbaiknya karena lebih memilih kandidat dari keluarga kalangan petahana (*incumbent*) yang kualitas dan kapasitas kepemimpinannya banyak diragukan. Kecenderungan ini tampaknya tidak lepas

dari kemunduran institusionalisasi kepartaian dan pragmatisme demokrasi elektoral yang membuat partai politik menjadi lebih berorientasi pada pemenangan kursi jabatan publik.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hubungan kekerabatan dalam menentukan keberhasilan kader perempuan dalam pemilihan legislatif. Apakah mereka mampu memanfaatkan hubungan tersebut untuk meraih posisi strategis, ataukah mereka justru terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan keluarga yang membatasi ruang gerak mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab guna memahami dinamika politik perempuan di DKI Jakarta dan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Peran partai politik dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik sangat penting. Namun, karena lemahnya lembaga partai dan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, ada kecenderungan menguatnya politik kekerabatan yang tampaknya menjadi jalan pintas bagi partai politik untuk memenangkan kontestasi politik maupun menjamin eksistensi suatu rezim politik tertentu karena partai politik merupakan pintu masuk terjadinya politik kekerabatan, maka kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan juga dilakukan melalui kajian proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

Tabel 2. Beberapa Politik Kekerabatan pada anggota DPRD DKI Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029	Kerabat yang sedang/pernah punya jabatan di pemerintahan
Nabilah Aboebakar Al-Habsyi (PKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Habib Aboebakar Al-Habsyi (Ayah): <ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Periode 1999-2004 b. Sekretaris Jendral PKS Periode 2020-2025 - M. Hasan Abdilah (Suami): Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Inad Luciwaty (PKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Rustam Effendi (Suami): <ul style="list-style-type: none"> a. Walikota Jakarta Utara ke-9 Periode 2015-2016 b. Walikota Jakarta Barat ke-12 Periode 2018-2020
Yuke Yurike (PDIP)	<ul style="list-style-type: none"> - Adang Ruchiatna (Ayah): Anggota DPR RI Fraksi PDIP Periode 2009-2014
Alia Noorayu Laksono (Golkar)	<ul style="list-style-type: none"> - Agung Laksono (Ayah): <ul style="list-style-type: none"> a. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia ke-7 b. Ketua DPR RI ke-14 c. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI ke-15 d. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2019-2024 - Dave Laksono (Kakak): Anggota DPR RI Fraksi Golkar Periode 2024-2029
Farah Savira (Golkar)	<ul style="list-style-type: none"> - Yahya Zaini (Ayah): <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota DPR RI Fraksi Golkar Periode 2004-2009 b. Ketua DPP Golkar bidang Organisasi Periode 2024-2029

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa caleg perempuan yang sekarang menduduki kursi DPRD DKI Jakarta berasal dari kalangan keluarga yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia politik. Politik kekerabatan pada 6 caleg perempuan ini hampir semuanya adalah anak dari *incumbent* yang sekarang dan atau pernah punya posisi di pemerintahan. Dapat dilihat juga bahwa rata-rata dari mereka ini sama-sama masuk di partai politik yang sama dengan orang tua, saudara, atau suami.

Menurut Direktur Eksekutif Pol-Treking Institute Hanta Yuda, politik kekerabatan merusak saluran kaderisasi, mengganggu ritme kaderisasi karena tidak sehat, karena demokrasi berbasis pada masyarakat. Parpol juga harus jelas kerjanya dalam rekrutmen politik (antaranews.com). Tumbuh dan berkembangnya politik kekerabatan memunculkan sejumlah ketimpangan karena politik kekerabatan menutup akses bagi orang-orang yang memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk dapat menjabat di posisi-posisi politik. Sedangkan bagi mereka yang memiliki hubungan, sudah dipastikan calon tersebut dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan dan juga penguasaan wilayah. Jika suatu wilayah telah dikuasai oleh sekelompok elit bahkan dari keluarga yang sama, maka sumber daya daerah tersebut akan dikuasai oleh mereka. Dapat dipastikan bahwa kekuatan utama berada pada segelintir elit sehingga jalan kepentingannya pun tidak menutup kemungkinan hanyalah untuk kepentingan para elit, bukan untuk kebaikan bersama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai politik kekerabatan pada kader partai politik yang dalam hal ini adalah kader perempuan dalam pemilihan legislatif 2024 di DKI Jakarta, agar dapat ditarik kesimpulan hubungan antara politik kekerabatan dengan kader perempuan di partai. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **Relevansi Politik Kekerabatan pada Penempatan Kader Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di DKI Jakarta Tahun 2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di angkat pada penelitian ini yaitu: Bagaimana penempatan kader perempuan di Legislatif dapat memperkuat suatu klan partai politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana wujud keterlibatan Mulia Creative Hub dan para komunitas dalam kampanye Pasangan MULIA pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan dan bahan rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang dalam rangka peningkatan ilmu politik.

2. Manfaat Praktis :

- a. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat mengetahui pemanfaatan industri kreatif dalam kampanye politik.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik khususnya terkait pemanfaatan industri kreatif dalam konteks politik.

Tinjauan Pustaka

1.5 Politik Kekkerabatan

Kekerabatan adalah istilah untuk menyebut atau menyapa orang yang terikat kepada diri sendiri karena hubungan keturunan, darah, atau perkawinan. Berdasarkan definisi dari Dewi Anggraini (2013:2-4), Shem Iba (2019:4-7), dan Titin Purwaningsih (2015:101) dapat disimpulkan bahwa politik kekerabatan adalah adanya hubungan kekerabatan antara satu pejabat politik dengan pejabat/calon politik lainnya. Politik kekerabatan atau keluarga politik memang dapat dijumpai di hampir semua negara. Di Amerika Serikat misalnya, keluarga Kennedy masih dianggap sebagai kekuatan politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachusetts maupun di tingkat negara federal. Demikian pula dengan keluarga Taft dan Daley di Ohio dan Chicago. Saat ini Menlu Amerika, Hillary Clinton adalah istri dari mantan Presiden Bill Clinton.

Di Amerika, politik kekerabatan mengacu kepada konsep '*political family*'. Menurut Kurtz, disebut *political family* apabila terjadi minimal dua orang yang mempunyai ikatan kekerabatan menduduki jabatan politik. *A political family exist when two or more relatives hold or have held public office*. Istilah lain dari *political family* adalah *political kinship*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Casey. Sementara Stephen & Hess menggunakan istilah dinasti politik (*political dynasty*). Dinasti politik adalah suatu keluarga yang mempunyai minimal 4 anggota keluarga, terpilih dalam jabatan politik. Terdapat kerancuan dalam konsep yang dikemukakan oleh Casey, dimana dia mendefinisikan keluarga politik apabila terdapat dua anggota keluarga dalam kandidat politik, sementara di sisi yang lain, Casey memasukkan dinasti sebagai salah satu bentuk politik kekerabatan yang mengacu kepada pendapat Hess bahwa dinasti terbentuk apabila terdapat paling tidak 4 anggota keluarga menduduki jabatan politik.

Dari konsep Casey, Hess & Kurtz, kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti politik (*political dynasty*), keluarga politik (*political family*) maupun kekerabatan politik (*political kinship*), namun penulis menggunakan konsep politik kekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada aktivitas politik yang merekrut anggota kerabatnya dalam jabatan politik. Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan). Konsep politik kekerabatan dalam konteks ini bukan mengacu kepada dinasti dalam sistem monarki yang biasanya dilakukan secara turun-temurun, namun dalam konteks demokrasi yang dihasilkan melalui proses pemilu.

Rekrutmen kandidat dari keluarga politik terjadi karena faktor-faktor positif

yang dimiliki oleh kandidat dalam rekrutmen politik. Menurut Norris, kandidat dari keluarga politik mempunyai modal politik untuk terpilih yang meliputi koneksi politik, pengalaman dalam partai politik, pengalaman pekerjaan, pendidikan, dan ketrampilan dalam pelaksanaan fungsi legislatif. Dengan kata lain, kandidat dari keluarga politik mempunyai *political legacy* (legasi politik) yang diwariskan, baik pendidikan dan ketrampilan politik, nama keluarga yang dikenal publik, jaringan politik, sampai dengan pendanaan kampanye. Dalam konteks Indonesia, maraknya politik kekerabatan juga dipengaruhi oleh kekuatan oligarki dalam politik lokal.

1.6 Keterwakilan Perempuan

Konstruksi demokrasi dalam sistem politik Indonesia menggunakan sistem perwakilan (*representative democracy*). Menurut Brennan dan Allan Hamlin (2000) rakyat tidak membuat keputusan tentang hasil politik secara langsung namun sebaliknya, hasil politik diputuskan oleh beberapa kelompok "perwakilan" karena itu, esensi penting dalam sistem perwakilan adalah adanya sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik, dan sekelompok besar orang yang mewakilkan kepentingan-kepentingan kepada sekelompok kecil orang itu.

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan kesetaraan gender (dalam Astrid 2009:8). Salah satunya yaitu partai politik yang merupakan bagian dari infrastruktur politik yang memiliki fungsi politik yang penting, dalam proses untuk mendapat kursi di lembaga legislatif.

Menurut Anne Phillips (1998) konsep representasi dipahami sebagai upaya untuk menciptakan politik kehadiran. Keterwakilan merupakan hal yang penting bagi keterwakilan perempuan. Dengan demikian diharapkan dapat terwujudnya transformasi politik yang menekankan pada kehadiran perempuan sebagai pihak yang menempati posisi juang kecil dalam proses pengambilan kebijakan politik.

Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: *potitics of idea* dan *potitics of presence*. Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari para konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen. Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillip, yang ia sebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik

Keterwakilan Perempuan menurut Anne Phillips merupakan pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga

perlu keterwakilan secara langsung dari kalangan minoritas (perempuan) dalam lembaga-lembaga negara (Phillips 1998, 30). Anne Phillips memulai dengan pertanyaan mendasar terkait dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, “apakah para anggota parlemen yang disusun berdasarkan kesamaan parti politik yang dipilih melalui pemilu, mampu mewakili dan bersedia memperjuangkan kepentingan perempuan? Gagasan demokrasi perwakilan dengan lembaga perwakilan yang diberikan hak sebagai delegasi hak politik warga negara idealnya mengharuskan parlemen untuk selalu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, terutama kepentingan perempuan.

Keterwakilan politik dari Hanna Pitkin (1967) memberi empat perspektif ideal terkait keterwakilan politik yakni perspektif formal, perspektif deskriptif, perspektif substantif, dan perspektif simbolik.

Pertama pada perspektif formal, keterwakilan disebut sebagai pemberian wewenang secara hukum kepada wakil sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan untuk merepresentasikan berbagai kehendak, interaksi ini menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab yang ditanggung bersama antara wakil dan terwakil. Kedua perspektif deskriptif, memandang bahwa wakil adalah pihak yang mewakili. Tipe ini akan membela serta mengadvokasi kepentingan kelompok yang memiliki kesamaan karakter ataupun wajah politik. Ketiga perspektif simbolis, representasi yang menghasilkan ide bersama antara terwakil dan yang diwakili, kemudian segala bentuk representasi disimbolkan secara simbolik. Keempat perspektif substantif, pada konsep ini menyebutkan bahwa representator harus membawa kepentingan yang diwakili dalam kebijakan publik. Wujud dari keterwakilan ini adalah kebijakan serta hukum harus sejalan dengan kepentingan yang diwakilkan. (Ardi, 2014)

Dalam konteks Indonesia, penerapan keterwakilan perempuan yang paling tepat adalah dengan menggabungkan ketiga jenis representasi substantif, deskriptif, dan simbolik dalam kerangka kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif seperti kuota legislatif untuk perempuan sangat penting untuk meningkatkan jumlah perempuan di posisi politik, namun, lebih dari sekedar memenuhi kuota, adanya keterwakilan perempuan dalam politik dapat mewakili kepentingan perempuan, sebab politisi perempuan paling siap untuk mewakili kepentingannya sendiri. Teori ini erat kaitannya dengan konsep keterwakilan yang dirumuskan Pitkin yakni representasi deskriptif dan substantif, yang mana jika jumlah keterwakilan meningkat, maka kepentingan terwakil akan semakin disuarakan di parlemen. Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen maka kepentingan perempuan semakin digaungkan di parlemen. (Syafputri, 2014).

1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam memperkaya referensi maka pencarian penelitian terdahulu merupakan bagian dari usaha peneliti untuk mencari sumber data dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu memberikan manfaat untuk menunjukkan urgensi dari sebuah penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu

1. Skripsi dengan judul “MENAKAR POLITIK KEKERABATAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020” pada tahun 2020 oleh Bambang Arianto. Skripsi ini membahas tentang menguatnya politik kekerabatan dan hubungannya dengan partai politik di Indonesia. Dalam kontestasi pemilihan

kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 masih banyak bermunculan kandidat politik yang berasal dari jejaring politik kekerabatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan berbagai literatur pendukung sesuai topik penelitian. Penelitian ini berpendapat bahwa politik kekerabatan dalam Pilkada serentak 2020 telah merusak kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Artikel ini juga berpendapat bahwa politik kekerabatan telah memberikan dampak buruk bagi pelembagaan internal kepartaian di Indonesia.

2. Skripsi dengan judul “POLITIK KEKERABATAN YASIN LIMPO DI SULAWESI SELATAN” pada tahun 2023 oleh Marselindah, Anugrah. Skripsi ini membahas tentang beberapa keluarga Yasin Limpo yang masih menduduki jabatan struktural di pemerintahan maupun jabatan diluar pemerintahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini berpendapat bahwa bertahannya eksistensi politik kekerabatan Yasin Limpo di Sulawesi Selatan di dasari oleh adanya kultur keluarga yang berangkat dari sebuah ideologi, konsistensi mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat, dan dukungan dari sesama anggota keluarga Yasin Limpo yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.

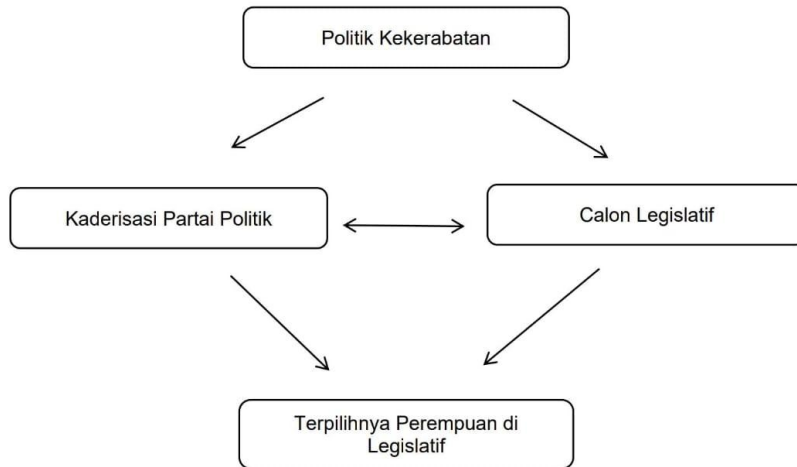
3.

4. Skripsi dengan judul “KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA: STUDI TENTANG PEROLEHAN SUARA PEREMPUAN PARTAI PPP DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2014” oleh Rizqi Abdurrahman Masykur pada tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai aturan batas minimum 30% caleg perempuan dalam pencalonan legislatif di DKI Jakarta namun hasilnya adalah berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Pada tahun 2014 aturan tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada di PPP pada umumnya dan wilayah DKI Jakarta khususnya tentang keterwakilan perempuan. Teori yang penulis gunakan adalah teori gender tentang feminisme liberal dan konsepsi patriarki, lalu teori kuota perempuan, serta terakhir teori oligarki partai politik. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa stereotipe masyarakat tentang perempuan yang lemah, masih menjadi penyebab minimnya perolehan suara perempuan secara umum dalam pemilu, pada partai PPP ditemukan bahwa basis massa partai yang notabene banyak dari kalangan Islam tradisional menyebabkan caleg perempuan kurang diminati, adapun satu perempuan yang terpilih juga karena yang bersangkutan mempunyai modal sosial yaitu majlis taklim sebagai basis massanya dan pada kenyataannya pada calon tersebut merupakan bagian dari oligarki partai.

Perbandingan dari ketiga penelitian di atas, yang dimana penelitian tersebut memiliki cukup kesamaan namun juga perbedaan. Pada penelitian yang pertama dan kedua, penelitian tersebut membahas hal yang serupa yaitu politik kekerabatan. Penelitian pertama lebih berfokus kepada kontestasi kepala daerah Sedangkan, penelitian yang kedua, berfokus kepada sosok Yasin Limpo yang keluarganya sudah lama menjabat di Sulawesi Selatan. Adapun penelitian ketiga, yang lebih berfokus pada keterwakilan perempuan dalam partai yang ternyata ditemukan adanya modal sosial sehingga bisa terpilih. Dari ketiga penelitian tersebut, penelitian saya lebih menyoroti mengenai bagaimana proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai terhadap kader-kader perempuannya yang

memiliki relevansi kekerabatan dengan petahana dapat memperkuat suatu klan poliitk.

1.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Kerangka berpikir banyak digunakan untuk mempermudah penulis untuk menyelesaikan karya tulis baik itu karya tulis kreatif maupun penelitian. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai visualisasi dalam bentuk diagram atau tabel yang saling berhubungan. Dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian bisa dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan mengacu pada teori kekerabatan dan keterwakilan perempuan dalam ilmu politik, penelitian ini berusaha melihat bagaimana relevansi antara politik kekerabatan dengan penempatan kader perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2024.

Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah politik kekerabatan mempunyai peran dalam pelaksanaan kaderisasi untuk menghasilkan kader perempuan yang akan ditempatkan di Pemilihan Legislatif.

BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang dilakukan pada penelitian ini. Adapun substansi bab, yang diuraikan, yaitu tipe, dan jenis penelitian, waktu dan lokasi, penelitian, jenis dan sumber data, teknik, pengumpulan data, dan teknik analisis, data.

2.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, yang dimana penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dengan apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha menggambarkan secara faktual mengenai penempatan kader perempuan di legislatif dengan penguatan partai politik. Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian berlangsung dari bulan November 2024 hingga Februari 2025. Tahap penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni tahap pra penelitian dan persiapan penelitian yang meliputi pengumpulan data awal dan penyusunan proposal penelitian dan tahap pengumpulan data dengan mewawancarai informan untuk memperoleh informasi dan mengelola data penelitian, Penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Dipilihnya lokasi ini karena wawancara akan dilaksanakan di kantor DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di Kota Jakarta.

2.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer didapat dari sumber informasi yaitu individual atau perseorangan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini berfungsi sebagai rujukan utama dalam penelitian ini yang mana data ini merupakan data yang diambil langsung dari informan. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber sebagai data utama untuk mendeskripsikan serta menjelaskan proses rekrutmen kader partai politik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti berupa informasi tanpa harus diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, skripsi, jurnal, serta data dari internet yang berhubungan langsung dengan penelitian seperti Instagram dari Anggota DPRD DKI Jakarta dan Website resmi dari Partai maupun Organisasi Sayap Partai.

2.4 Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Moleong (2000) informan penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Penelitian ini akan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara mendalam bersama para informan guna mengetahui, menjelaskan, serta mendeskripsikan mengenai relevansi politik kekerabatan pada kader perempuan dalam pemilihan legislatif di DKI Jakarta tahun 2024.

Berikut beberapa informan penelitian yang menjadi sumber data:

1. Farah Savira, Kader Perempuan dari Fraksi Golkar yang menjadi Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta 2024
2. Alia Noorayu Laksono, Kader Perempuan dari Fraksi Golkar yang menjadi Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta 2024
3. DPP Golkar
4. AMPI

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010:51), metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

2.5.1 Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka, bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian. Salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai informan atau orang yang diwawancarai (narasumber). Pewawancara adalah pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Informan dianggap paham atau mengetahui informasi terkait permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap informan dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan lalu mencatat informasi yang didapatkan yang kemudian dijadikan bahan penulisan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan satu informan pertama yang nantinya akan merekomendasikan informan selanjutnya yang kiranya mampu dan layak untuk diwawancarai. Maka untuk informan pertama, penulis melakukan wawancara dengan Farah Savira, untuk pewawancara kedua penulis mewawancarai Alia Noorayu Laksono, lalu wawancara pendukung dilakukan dengan staf DPD Golkar DKI Jakarta dan juga Perwakilan dari AMPI

2.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi mempunyai peran penting dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data berupa dokumen-dokumen tertulis maupun gambar atau foto ketika melakukan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa gambar pada saat melakukan wawancara, terdapat pula dokumen berupa rekaman suara antara penulis dengan informan.

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 teknik, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga Teknik tersebut akan dibahas sebagai berikut.

2.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemutusan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari informan dalam bentuk rekaman audio yang direkam dengan alat perekam (handphone), lalu penulis mengubah rekaman tersebut menjadi tulisan. Kemudian, hanya tanggapan yang relevan dengan focus penelitian yang diambil, sementara tanggapan yang tidak relevan diabaikan.

2.6.2 Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuknya berupa catatan lapangan atau matriks, grafik, jaringan, dan tabel. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang terorganisir secara konsisten dan mudah di akses untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, bentuk penyajian data yang digunakan penulis yakni berupa kutipan kutipan langsung dari hasil rekaman wawancara dengan informan, yang disajikan sesuai pemahaman penulis tanpa mengubah makna dari pernyataan informan.